

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris yang letaknya berada digaris khatulistiwa yang artinya letak Indonesia sangat strategis bagi sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia memiliki peranan penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 273 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Memiliki jumlah penduduk yang banyak muncul masalah yang cukup banyak yaitu masalah pangan, masalah stabilitas pada masyarakat, dan masalah keamanan. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan memiliki wilayah yang luas ketahanan pangan tentu menjadi hal yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian akan memiliki peranan yang penting dalam mengatasi masalah ketahanan pangan dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian.

Kontribusi sektor pertanian untuk pembangunan perekonomian sangat besar dan seharusnya petani dapat menerima pendapatan yang lebih layak namun kenyataannya penduduk yang kebanyakan miskin ada pada pekerjaan sebagai petani. Hal ini tentu menjadi masalah dan banyak faktor yang menyebabkan petani sulit untuk memperbaiki taraf pendapatan, kelayakan hidup, kecukupan hidup, dan kebutuhan hidup. Faktor – faktor yang menjadi penyebab petani sulit mensejahterakan hidupnya yaitu rendahnya pengetahuan karena tingkat pendidikan dan penerapan teknologi modern yang canggih, ketersediaan lahan sebagai tempat bekerja, pendapatan petani yang minim karena harga hasil pertanian yang dihasilkan tidak seimbang dengan proses bekerja sebagai petani, dan fasilitas yang kurang mendukung bahkan dipersulit.

Cara untuk meningkatkan taraf kehidupan petani adalah dengan membantu meningkatkan produktivitas usaha taninya. Dengan mengabaikan faktor-faktor kendala alam di sektor pertanian, seperti cuaca dan curah hujan, maka salah satu caranya adalah memperbaiki teknologi pertanian, seperti penggunaan pupuk sebagai sarana produksi. Namun, di Indonesia masalah pupuk menjadi persoalan yang cukup serius pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengolah lahan dan meningkatkan produktivitas produk pertanian. Ketika pupuk sulit

didapatkan dan harganya relatif mahal itulah yang menjadi dampak buruk bagi petani. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk bagi petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan.

Industri pupuk Indonesia dibangun dari kebutuhan dalam negeri dan dikuasai oleh sebuah perusahaan milik negara, yaitu: perusahaan pupuk Indonesia agar dapat memfokuskan misinya pada pembangunan pertanian nasional. Namun, kebijakan pada subsidi pupuk masih menjadi isu nasional yang tidak pernah mendapatkan solusi yang permanen. Kebijakan ini di satu sisi berdampak positif dalam mendukung peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan petani, di sisi lain berdampak negatif terhadap pembiayaan negara. .

Di sisi lain, kebijakan subsidi pupuk menunjukkan ketidaksesuaian pemerintah dengan kebutuhan petani, terutama bagi petani kecil. Rencana pemupukan yang dikeluarkan pemerintah adalah agar petani kecil mengikuti “6 prinsip keadilan” dalam usahanya berkembang, yaitu jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga. (Prasarana et al., 2017) . Kebutuhan penggunaan pupuk (kimia) bagi petani menimbulkan berbagai dinamika distribusi dan penggunaannya. Pupuk bersubsidi sering disalahgunakan sehingga menyebabkan pekerja tidak tepat sasaran, padahal seharusnya pupuk bersubsidi disasarkan pada petani kecil, khususnya di sektor pangan.

Kebijakan pemerintah efektif jika masyarakat mendapatkan dukungan organik untuk mengurangi beban pembelian dan penggunaan pupuk. Oleh karena itu, penerapannya sesuai dengan prinsip kerja atau yang disebut prinsip Asas enam tepat di perusahaan infrastruktur “Kartu Tani”. Kementerian Pertanian membentuk Program Kartu Tani untuk memudahkan penyaluran pupuk ini disubsidi dengan tujuan agar hanya petani kecil yang menjadi sasaran subsidi/bantuan ini. Kartu Tani dirancang khusus untuk petani kecil yang yayasannya sudah berdiri di pulau Jawa. Bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA) berperan penting dalam implementasinya di lapangan. Sejak 2018, tiga bank umum telah bermitra dengan Kementerian Pertanian untuk menerbitkan kartu kredit kepada petani, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) di wilayah Banten, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Bank Mandiri di Jawa Barat dan Bank Negara Indonesia (BNI) di Timur Jawa. .

Sejak di luncurkan kartu tani pada 2016, aplikasi program kartu tani belum menunjukkan kemajuan yang baik sebagaimana diharapkan (Ashari & Hariani, 2018). Perencanaan pupuk yang digunakan oleh kelompok tani, dimana pupuk dijual dengan jarak kios jauh dari petani, jenis pupuk yang tidak selalu dibutuhkan dan volume pupuk yang dibeli tidak efisien. Terkait dengan hal tersebut, beberapa di antaranya yaitu hambatan pelaksanaan Program Kartu Tani di lapangan. Implementasi interaksi petani dan promosi oleh pemangku kepentingan yang tidak efektif menyebabkan petani tidak memahami cara menggunakan peta petani. Dukungan lembaga terkait dan kerjasama dengan pihak perbankan (Himbara) yang bertugas mengajukan kartu tani tidak selalu digalakkan.

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan DIY, kartu tani merupakan program pemerintah untuk menjaga subsidi pupuk bisa tepat sasaran. Dengan kartu tani masing-masing petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi dapat memeriksa kuota dan jenis pupuk pada mesin atm atau mesin EDC (*Electronic Data Capture*) di kios pengecer. Kouta pupuk yang akan didapatkan sesuai dengan luas lahan yang dimiliki petani yang tercantum di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa mendukung program kartu tani. Setiap ada kesempatan pembinaan ke kelompok tani disampaikan terkait sosialisasi kartu tani.

Beberapa penggarap sawah di Kota Yogyakarta sudah mulai menerapkan sistem penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani yang sudah digalangkan seluruh Indonesia sesuai program Kementrian Pertanian RI. Petani hanya perlu mengisi kartu tersebut dengan sejumlah uang yang akan digunakan menebus pupuk di penyalur pupuk menggunakan mesin EDC yang disediakan oleh Bank BRI di kios pengecer pupuk subsidi. Kartu tani memiliki fungsi yang sangat banyak, namun ada beberapa kendala yang menjadi permasalahan. Permasalahan kartu tani antara lain yaitu kartu yang reject yang masih dalam perbaikan di Kementan dan BRI pusat.

Tabel 1. Data RDKK Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul 2022

Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani	Petani Pemilik Kartu Tani	Luas Lahan
Panjangrejo	16	1549	1131,16
Srihardono	17	1519	836,88
Seloharjo	17	1101	764,92

Sumber data RDKK Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, 2022

Di Kapanewon Pundong terdapat tiga Kelurahan yang menggunakan kartu tani yaitu Kelurahan Panjangrejo, Kelurahan Srihardono, dan Kelurahan Panjangrejo. Dari ketiga Kelurahan tersebut Kelurahan Panjangrejo memiliki petani paling banyak menggunakan kartu tani namun dari banyaknya petani yang terdaftar kartu tani, menurut pemilik kios di Kelurahan Panjangrejo masih terdapat banyak petani yang belum mengaktifkan kartu tani. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, timbul pertanyaan bagaimana profil petani pemilik kartu tani di Kelurahan Panjangrejo, persepsi petani tentang penggunaan kartu tani di Kelurahan Panjangrejo dan bagaimana hubungan antara faktor-faktor pembentuk persepsi terhadap penggunaan kartu tani di Kelurahan Panjangrejo?

### **B. Tujuan**

1. Untuk mengetahui profil petani pengguna kartu tani di Kelurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui persepsi petani terhadap penggunaan kartu tani di Kelurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk persepsi petani terhadap penggunaan kartu tani di Kelurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.

### **C. Kegunaan**

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan kepada pihak pemerintah untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem penyaluran pupuk bersubsidi dengan kartu tani.